

ANALISIS POLEMIK POLITIK IDENTITAS PARTAI UMMAT DI PEMILU 2024

Lainuvar

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Email: lainuvar66@gmail.com.

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang bagaimana dinamika politik identitas di Indonesia dan utamanya polemik yang ditimbulkan oleh Partai Ummat dimana merupakan satu-satunya partai yang secara terang-terangan mengakui partainya merupakan partai politik identitas. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini akan menjelaskan secara rinci mengenai polemik politik identitas Partai Ummat di Pemilu 2024. Dengan teknik analisis data secara mendalam, artikel ini menyajikan bentuk ideologi dan pemikiran dari Partai Ummat mengenai ihwal politik identitas. Peneliti memulai dengan menjelaskan narasi politik identitas di Indonesia kemudian menjelaskan gambaran umum Partai Ummat dan yang terakhir serta menjadi puncak dari penelitian adalah analisis mengenai polemik politik identitas Partai Ummat di Pemilu 2024 dengan menganalisis berbagai sumber data, seperti artikel, buku, dan data lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi politik identitas di Indonesia selalu mengarah pada konotasi negatif, sehingga pernyataan Ketua DPP Partai Ummat menuai kontroversi di kalangan masyarakat maupun elit politik. Beragam komentar mulai dari pendapat pro dan kontra mengiringi pemberitaan politik identitas yang dicanangkan Partai Ummat dalam meraih suara di Pemilu 2024. Kedua pendapat ini dapat diketengahkan melalui fungsi partai berhaluan Islami sebagai sarana pendidikan dengan basis moderasi beragama, sehingga konflik politik identitas dapat diredam.

Kata Kunci: *Politik identitas ; Partai Ummat ; Pemilu 2024.*

Abstract

This article reviews the polemics caused by the Ummat Party, the only party that openly recognizes its party as an identity political party. Through a qualitative approach, this article will explain in detail the polemics of the Ummat Party's identity politics in the 2024 elections. With in-depth data analysis techniques, this article presents the ideological forms and thoughts of the Ummat Party regarding identity politics. The researcher starts by explaining the narrative of identity politics in Indonesia and then explains the general description of the Ummat Party. The research's last culmination is an analysis of the Ummat Party's identity politics controversial in the 2024 Election by analyzing various data sources, such as articles, books, and other relevant data. The results showed that the identity politics narrative in Indonesia always leads to negative connotations. Hence statement as Chairman of the Ummat Party DPP reaped controversy among the public and political elites. Various comments ranging from pro and con opinions accompanied the news of identity politics launched by the Ummat Party in gaining votes in the 2024 elections. Both of these opinions can be addressed through the function of Islamic parties as a means of education based on religious moderation, so that identity politics conflicts can be reduced

Keywords: *Identity politics; Ummat Party; 2024 elections.*

1. PENDAHULUAN

Sejak berdirinya, Indonesia merupakan negara yang mapan dengan berbagai unsur budaya, ras, dan agama. Unsur-unsur tersebut hadir dengan membawa relitas budaya dan tradisi dalam kultur masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia memakai semboyan Bhineka Tungga Ika dalam lambang negara yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dan moderat, semboyan tersebut sesuai dengan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk namun tetap menjunjung tinggi kesatuan (Pursika, 2009: 17). Berbagai perbedaan dan persamaan antar suku, ras, dan agama jugalah yang kemudian diperlukan tanda pengenal atau identitas suatu negara yang berfungsi sebagai pengenal dan pembeda karakter antar satu negara dengan negara lain. Identitas negara Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945 yang mengungkap filosofi yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain (Afifah, 2018: 188).

Pembentukan identitas ini dapat terbentuk baik secara parsial ataupun interaksi, hal inilah yang akan mengakibatkan adanya perubahan dalam ranah sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Proses demokrasi di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari identitas agama, hal ini dapat kita lihat kepada partisipasi partai politik yang mengikuti Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Oleh sebab itu, identitas agama kerap dijadikan sebagai alat politik atau strategi partai politik tertentu (Suryani and Ana Sabhana Azmy, 2016: 21). Strategi politik yang mengatasnamakan identitas agama biasa disebut sebagai politik identitas, politik identitas sendiri diartikan sebagai kebijakan untuk memprioritaskan keperluan anggota suatu kelompok atau individu tertentu karena memiliki identitas sama baik berdasarkan ras, suku, ataupun agama (Wingarta et al., 2021: 122).

Politik identitas seperti yang telah disebutkan mencakup beberapa unsur, salah satunya adalah unsur kesamaan agama. Agama merupakan unsur yang sangat sensitif diperbincangkan di dunia publik karena sangat berpotensi mengundang kerusuhan tentunya berkaitan erat dengan kepercayaan seorang individu (Kunawi, 2012: 174). Agama yang memiliki sifat demikian kemudian dijadikan tunggangan politik untuk merebut suara masyarakat dalam pemilu di Indonesia, kepentingan-kepentingan politik yang dibungkus sedemikian rupa untuk selaras dengan golongan agama tertentu inilah yang kemudian dianggap oleh masyarakat luas sebagai sebuah makna dari politik identitas. Partai-partai politik yang memiliki ambisi besar untuk menduduki kursi-kursi kepemimpinan kemudian menggunakan wacana politik identitas dalam arus strategi mereka.

Penggunaan politik identitas dalam pemilu sebenarnya telah dimulai sejak lama. Praktik politik identitas yang cukup terkenal dan membekas di benak masyarakat adalah penggunaan politik identitas dalam Pilkada DKI tahun 2017 yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menistakan agama Islam yang akhirnya pecah dengan aksi 212 dari masyarakat muslim sebagai respon atas pernyataan Ahok tersebut. Pada akhirnya, Pilkada 2017 dimenangkan oleh Anies-Sandi dalam putaran kedua. Tampak dari Pilkada 2017 bahwa suara masyarakat sangat dipengaruhi oleh eksternal dirinya, seperti dalam kasus politik identitas yang sangat memiliki pengaruh dan bahkan dianggap oleh

sebagian orang sebagai sebuah alarm “bahaya” dalam dunia politik (Fadhlan and Azizah, 2023: 642).

Salah satu partai politik yang cukup disorot pada pemilu tahun 2024 adalah Partai Ummat. Partai Ummat merupakan salah satu partai politik yang resmi dan diakui di Indonesia. Meskipun menjadi salah satu partai yang cukup kontroversial utamanya statement dari beberapa pimpinan Partai Ummat itu sendiri. Partai Ummat menggagas politik Islami. Hal ini terlihat dari visinya yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* dengan menegakkan nilai-nilai persaudaraan atau ukhuwah, kebebasan atau *hurriyah*, kesamaan atau *musawwah*, keadilan atau *adalah* dalam wadah NKRI (Muhammad Hima El Muntaha and Tian Adhia Nugraha, 2024: 75-76). Baru-baru ini pernyataan kontroversial mengenai pidato Ketua Umum Partai Ummat bahwa partai anyar tersebut merupakan partai yang mengusung politik identitas dalam Pemilu 2024. Tentunya pernyataan ini menuai berbagai reaksi dari pemerintah dan masyarakat.

Politik identitas dalam berbagai karya tulis ilmiah telah banyak muncul mengingat negara Indonesia erat bersinggungan dengan keagamaan. Agama kerap dijadikan tunggangan untuk kepentingan politik sehingga politik identitas menimbulkan konflik utama politik (Febriansyah, Manando and Kusuma, 2024: 58). Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul “Polemik Politik Identitas di Indonesia” karya Maghfira Faraidiany dkk yang terbit di *Journal of Political Sphere* Volume 3 Nomor 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai gambaran umum mengenai politik identitas. Dalam penelitian ini dibahas pula politik identitas dilihat dari sisi positif atau negatif dan bagaimana konflik yang timbul sebagai akibat dari adanya politik identitas yang mementingkan kesamaan antar identitas (Maghfira Faraidiany, Novita Sari and Siti hardiyanti, 2022: 28).

Penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya adalah penelitian yang berjudul “Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia” hasil penelitian dari Wingarta dkk. Masuk dalam Jurnal Lemhannas RI Volume 9 Nomor 4. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian ini membahas tentang strategi berpolitik untuk menarik minat masyarakat dengan mendahulukan kepentingan kelompok atau individu yang memiliki kesamaan identitas. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana corak ideologi partai politik dalam hubungannya dengan fenomena politik identitas di Indonesia. Penelitian ini juga mengulas lebih lanjut mengenai hubungan antara politik identitas dan populisme bersentimenkan agama dalam pertarungan politik. (Wingarta et al., 2021: 122).

Penelitian berikutnya adalah hasil karya Widyawati dengan judul “Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis” Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini membahas tentang berbagai pemicu konflik keragaman yang ada di Indonesia, bagaimana gambaran sejarah politik identitas dan nasionalisme di Indonesia. Selain gambaran umum dari politik identitas itu sendiri, penelitian ini juga merambah kepada yang lebih khusus yakni

kebangkitan politik identitas Islam yang kemudian dikerucutkan dalam area pemilihan Gubernur Jakarta (Wati, 2021: 70-78).

Ketiga penelitian diatas secara garis besar menyentuh tema utama yang sama yakni persoalan politik identitas yang ada di Indonesia. *Novelty* dari artikel ini sangat nampak ketika fokus yang dipakai lebih kepada segolongan partai tertentu yakni Partai Ummat yang merupakan partai resmi di Indonesia dan kerap menjadi sorotan masyarakat. Sedangkan jika kita telisik tiga artikel diatas tidak membahas politik identitas yang dinyatakan langsung oleh Ketua Umum Partai Ummat. Artikel-artikel diatas hanya mengerucut kepada gambaran umum politik identitas yang ada di Indonesia tanpa menspesifikkan pembahasannya dalam perihal Partai Ummat dan Pemilu 2024.

Artikel ini memiliki bertujuan mengulas secara lebih kompleks terkait politik identitas yang menyatu dengan strategi politik Partai Ummat di pemilu 2024 serta penilaian pemerintah atau badan terkait serta masyarakat terkait pernyataan kontroversial tersebut. Berkenaan dengan ini, akan muncul hipotesa bahwa, apakah Partai Ummat menyatakan partainya adalah partai dengan ideologi Politik Identitas memiliki maksud tertentu dalam kompleksitas maknanya, mengingat politik identitas memiliki beragam pemahaman dari berbagai sudut pandang. Masyarakat pun ikut mengomentari perihal pernyataan tersebut dengan komentar yang mengarah pada substansi negatif, seperti halnya PDIP dan PAN yang juga berkomentar dengan arah yang negatif. Berbeda dengan Anies Baswedan yang memiliki sudut pandang lain dalam mengomentari pernyataan tersebut. Lalu, apakah pernyataan politik identitas oleh Partai Ummat tersebut mempengaruhi kontestasi Pemilu 2024. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif sendiri berfokus pada pengumpulan data yang kaya dan komprehensif serta sangat efektif untuk memahami proses dan makna dibalik fenomena sosial yang disajikan dengan deskriptif yang tidak dapat dijangkau oleh metode kuantitatif (Rukin, 2019: 6). Fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan strategi politik identitas Partai Ummat, hal ini dipilih karena politik identitas dapat mempengaruhi dinamika pemilu, baik dalam hal dukungan pemilih maupun potensi konflik sosial. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada sumber artikel jurnal, *e-book*, serta berita dari website-website kredibel yang relevan dengan polemik politik identitas, kondisi ideologi Partai Ummat, dan beragam stigma sekitar baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sumber data tersebut dipilih karena secara langsung berkaitan dengan isu politik identitas dan ideologi Partai Ummat, serta stigma yang ada di masyarakat, ini penting untuk memahami konteks dan dinamika yang memengaruhi pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan data yakni dengan menelusuri berbagai sumber data yang berkaitan dengan politik identitas Partai Ummat dan stigma sekitar, yakni dari sumber artikel jurnal, *e-book*, dan website-website yang

kredibel (Akbar Iskandar et al., 2023: 51). Setelah data ditelusuri, lalu data tersebut dievaluasi kualitas dan relevansi informasi yang disediakan, setelah itu untuk memastikan keakuratan informasi maka data-data tersebut kemudian dibandingkan untuk membangun kredibilitas data yang digunakan. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif yakni mendeskripsikan temuan secara sistematis, selanjutnya merangkum dan memilih pokok-pokok pembahasan dari data yang diperoleh, lalu menyajikan data dalam bentuk deskriptif untuk kemudian disimpulkan bagaimana pernyataan politik identitas secara gamblang digaungkan oleh Partai Ummat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Politik Identitas dan Pemilu di Indonesia

Politik identitas sejatinya dalam terminologi merupakan kelanjutan antara relasi agama dan politik dalam kajian ilmiah. Menurut Lukmantoro, politik identitas merupakan sebuah kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak karena memiliki identitas yang sama baik dari sudut pandang suku, ras, gender, maupun agama. Politik identitas bergerak dengan upaya menyalurkan berbagai aspirasi, kepentingan, kekuasaan, dan pengaruhnya kepada diri sendiri atau dalam jangkauan primordialisme. Sedangkan dalam konteks identitas agama, politik identitas berupaya untuk memasukkan berbagai nilai beragama dalam prosesnya, misalnya dalam merencanakan kota tertentu menjadi kota yang identik dengan agama tertentu pula (Widayanti, 2009: 47).

Politik dalam jangkauan luas, menuju pada makna bahwa politik identitas ini berkepentingan dengan pembebasan dari kondisi termarginalkan yang secara khusus mencakup keanggotaan dari kelompok dalam ranah yang lebih luas. Jika diperhatikan lebih cermat lagi, sebenarnya politik identitas adalah nama lain dari biopolitik yang membahas mengenai sebuah kelompok yang identik dengan karakteristik biologis atau tujuan tertentu yang mengarah pada tujuan biologisnya dari suatu titik pandang, sebagai contoh yang kita temukan yakni politik ras atau politik gender. Politik identitas terbentuk sebagai kesadaran individu membeberkan identitas spesifik dalam bentuk relasi dalam identitas primordialisme etnik dan agama. Akan tetapi, dalam perjalanannya politik identitas justru direngkuh oleh kelompok masyarakat yang mengandalkan unsur “mayoritas” untuk mendominasi kekuasaan (Nasruddin, 2018: 37).

Politik identitas di Indonesia lebih berkaitan dengan aspek suku, agama, dan ideologi. Bagi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, politik identitas menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan jika dikuatkan dengan penguatan nasionalisme. Praktik politik di Indonesia semakin marak digunakan untuk memenangkan kompetisi pemilihan. Sebut saja, terkait elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dalam PILPRES kemarin mengalami penurunan dalam pemilih non muslim, tetapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan bagi kalangan pemilih muslim. Islam terutama yang berperan sebagai agama mayoritas seolah menjadi tolak ukur untuk para tokoh politik agar memenangkan kompetisi. Oleh karena itu, hal itu merupakan sebuah bukti nyata dalam kaitannya dengan politik identitas, bahwa politik

identitas masih sangat diminati. Politik identitas terbukti mampu untuk memenangkan kompetisi politik. Oleh karena itu, praktik politik identitas selalunya menjadi pilihan utama oleh para elit politik (Firdaus and Andriyani, 2021: 48).

Berkaitan dengan proses perpolitikan di Indonesia, politik kerap bersinggungan dengan pemerintah yang memiliki peran sebagai instrumen dalam penyelenggaraan sebuah demokrasi. Demikian pula dengan posisi Pemilu yang sangat penting agar dalam proses berdemokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sebab, tidak ada sebuah negara yang dapat menjalankan proses demokrasi yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan juga sepenuhnya untuk rakyat. Oleh karenanya pemilu dianggap menjadi sebuah cara yang paling kompeten untuk seluruh rakyat dalam suatu negara untuk kemudian mencapai demokrasi yang baik dalam *representative goverment* atau demokrasi perwakilan modern. Keikutsertaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari sebuah demokrasi (Budiardjo, 2008: 105).

Pemilu di Indonesia masih menjadi sebuah ajang pemilihan yang selalu dirayakan oleh masyarakat dan pesta demokrasi yang juga kerap dilakukan sebagai sebuah agenda rutin. Dalam sebuah persaingan ide dalam proses berpolitik terus dilakukan oleh para calon kandidat untuk menentukan siapa yang paling pantas menduduki suatu jabatan yang dibutuhkan dalam pemerintahan. Sedangkan proses demokrasi di Indonesia sendiri tidak dapat lepas dari orientasi identitas baik dari agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini, sederhananya dapat kita lihat melalui berbagai partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu yang kemudian dari berbagai partai satu dengan partai lain memiliki ideologinya sendiri yang ikut mempengaruhi bagaimana cara mereka berkampanye. Oleh karena itu, berbagai ragam identitas dijadikan sebuah alat politik di Indonesia (Astuti, Agustang and Idrus, 2023: 1770).

Dilihat dengan tinjauan umum dari politik identitas dan sekelumit hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat dua faktor pokok yang kemudian membuat etnis dan agama menjadi muncul dan menarik serta berpengaruh dalam proses politik. *Pertama*, ketika etnis dan agama sama-sama menjadi faktor yang dipertaruhkan, maka ada semacam urgensi bagi suatu kelompok untuk mempertahankan dan membela identitas yang dimiliki kelompok tersebut. *Kedua*, apabila politik identitas dijadikan sebuah ajang kompetitif, tentunya kelompok-kelompok tersebut nantinya akan saling berhadapan dan tidak ada unsur dominan. Sehingga siapa pemenangnya dalam ajang kompetitif tersebut tidak dapat prediksi jauh-jauh hari. Pemilu yang menjadi wadah untuk sebuah ajang kompetitif inilah yang kemudian memasukkan salah satu faktor seperti politik identitas sebagai taruhan. Tinggal nantinya bagaimana tokoh yang terlibat didalamnya mengelola berbagai isu dan asumsi tentang etnis dan agama (Nasruddin, 2018: 37).

Representasi Umum Partai Ummat

Partai Ummat merupakan partai yang berhaluan Islam atau *rahmatan lil 'alamin*. Gambaran dari *rahmatan lil 'alamin* disini adalah partai yang menerapkan nilai-nilai kesilaman agar terwujudnya rahmat bagi alam semesta bukan saja hanya bagi manusia. nilai-nilai keislaman tersebut, seperti menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan bagi alam

semesta serta isinya, memanifestasikan kemanusiaan universal, serta menjauhkan dari berbagai kezaliman dan kerusakan. Partai Ummat dibangun atas landasan Al-Qur'an dan Sunnah. Partai Ummat konsisten dalam menegakkan keadilan dan memberantas berbagai kezaliman di dunia, sesuai dengan semboyan yang terus digaungkan oleh Partai Ummat yaitu lawan kezaliman dan tegakkan keadilan (Wiji Utomo, 2023: 27).

Partai Ummat lahir pada tanggal 24 April 2021 hari Sabtu, partai ini kemudian dideklarasikan di Yogyakarta pada Kamis tanggal 29 April 2021 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1442 H. Partai Ummat didirikan oleh Prof. Dr. Amien Rais bersama 92 rekannya, diantaranya Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom, M.Sc., Dr. H. Malem Sambat Kaban, SE, M.Sc (H. M.S. Kaban), H. Ansufri Idrus Sambo (Ustadz Sambo), Hj. Titi Widoretno Warisman (Hj. Neno Warisman), Achmad Buchori Muslim (UBM), Buni Yani, Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP., dan lain sebagainya (Argenti, 2021: 4).

Visi dari Partai Ummat adalah agar tercapainya negara Indonesia sebagai negara yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur* dengan upaya menegakkan nilai keilahiah, nilai *ukhuwah* atau persaudaraan, nilai *hurriyah* atau kebebasan, nilai *musawah* atau kesamaan, dan nilai *'adalah* atau keadilan dalam bernegara. Sedangkan misi Partai Ummat adalah sebagai berikut (Ramadhan, 2023: 44):

- a. Mempertahankan NKRI berdasarkan prinsip sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa,
- b. Menciptakan kehidupan berbangsa yang diberkahi oleh Allah dengan memegang teguh nilai keilahiah, menjaga nilai budaya bangsa, serta mengembangkan semangat perdamaian, toleransi, saling menghormati, dan kerjasama.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang amanah, adil, dan bertanggung jawab secara konstitusional melalui pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia,
- d. Menciptakan pemerintahan yang amanah, kuat, dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, dan sistem meritokrasi,
- e. Membangun sistem ekonomi Indonesia yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila sesuai dengan UUD 1945,
- f. Mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, energi, dan air,
- g. Menegakkan hukum dengan penuh keadilan tanpa adanya diskriminasi dengan melibatkan aparat dan institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional,
- h. Mengembangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan hukum, etika, moral, sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara transparan, objektif, benar, serta bertanggung jawab,
- i. Meningkatkan kualitas pendidikan yang holistik dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menciptakan sumber daya manusia. khususnya generasi muda milenial yang memiliki kesadaran ilahiah, berakhlak mulia, bersikap profesional, dan memiliki jiwa nasionalisme,
- j. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya untuk kepentingan umat,

- k. Memperjuangkan kemudahan berusaha, pemberdayaan ekonomi umat, perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan jaminan bagi pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi
- l. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan jaminan hak-hak tenaga kerja, petani, dan nelayan,
- m. Menciptakan tatanan kehidupan sosial yang saling menghormati, mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul, serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional,
- n. Meningkatkan perlindungan dan jaminan atas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi seluruh rakyat.

Tujuan Partai Ummat adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga, memelihara, dan menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Menjadi alat perjuangan untuk mencegah kezaliman dan menegakkan keadilan serta kedaulatan rakyat demi terwujudnya Indonesia negeri yang sejahtera dalam limpahan barokah Allah SWT;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menyerap, merumuskan dan memperjuangkan kemaslahatan dan aspirasi rakyat menjadi kebijakan Negara;
- e. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan integritas, kapabilitas, kesetaraan, dan keadilan gender;
- g. Membangun komunikasi politik berlandaskan akhlak dan etika politik, serta memperluas partisipasi politik warga Negara.

Fungsi Partai Ummat dalam hal ini adalah partai ummat sebagai suatu sarana pendidikan dalam bidang politik dengan upaya membangun etika dan budaya berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu Partai Ummat dalam hal ini berfungsi pula untuk meningkatkan partisipasi politik anggota serta simpatisan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Selain sebagai sarana pendidikan, Partai Ummat juga berperan sebagai sarana komunikasi politik dengan memadukan aspirasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan umat dalam penyelenggaraan negara. Terakhir, Partai Ummat merupakan partai sebagai sarana sosialisasi politik dan alat perjuangan dakwah sesuai visi, misi, dan tujuan Partai Ummat (Ramadhan, 2023: 45).

Polemik Politik Identitas Partai Ummat di Pemilu 2024

Kemajemukan identitas di Indonesia terancam dengan adanya isu politik identitas yang mengarah pada berbagai kehancuran integritas kehidupan beragama yang telah lama menancapkan pengaruhnya kepada masyarakat Indonesia. Politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami arus cukup deras dalam perkembangannya dengan melibatkan sebuah kepentingan kelompok yang menyingkirkan dan memeras pihak lawan. Politik identitas yang dominan di Indonesia merujuk kepada aktivitas keagamaan atau lebih

dikenal dengan politik identitas keagamaan yang menghadirkan kelompok “*golden*” yang dalam hal ini ditempati oleh kelompok muslim. Hal ini diperparah dengan munculnya politik identitas yang semakin memperkeruh keadaan sebab menggunakan berbagai isu agama yang kemudian menimbulkan banyak konflik sosial keagamaan (Harahap, 2014).

Melihat kondisi politik terkini, dapat dilihat bahwa isu politik identitas di Indonesia semakin menguat. Alih-alih memudar atau bahkan menghilang seiring berlalunya pilpres 2019, berita teranyar justru mencuat dari Partai Ummat sebagai partai baru di gelanggang dunia perpolitikan Indonesia dengan lantang mengangkat politik identitas sebagai jargon berpolitik partai anyar tersebut. Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan secara lugas dan tegas bahwa partai yang dipimpinnya ini merupakan partai yang berkiblat pada politik identitas dalam aktivitas politiknya yang terangkum dalam pidato Rapat Kerja Nasional di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Menurutnya, dengan menggunakan politik identitas, partai pimpinan Amien Rais tersebut akan banyak menarik masyarakat dan memproleh suara di pemilu 2024 (Luxiana, 2023).

Ridho Rahmadi selaku ketua umum, ia menyampaikan orasinya dalam acara RAKERNAS tersebut bahwa partai yang dipimpinnya harus bersikap tegas dan lantang. Bukan tanpa alasan, ia menuturkan bahwa menentang narasi politik identitas adalah tindakan yang sesat dan menyesatkan. Tampaknya Ridho Rahmadi dalam berbicara politik identitas condong kepada unsur keagamaan, hal ini terlihat ketika ia menjelaskan bahwa menentang politik identitas sama halnya dengan menghilangkan moralitas agama dalam ranah perpolitikan. Menurutnya, perilaku “menolak” akan berakibat pada hilangnya arah dalam dunia politik dan mereka yang justru akan terjebak pada moralitas relatif dan menempati etika yang situasional (Luxiana, 2023).

Wacana menentang politik identitas menurut Ridho Rahmadi adalah salah satu proyek besar dari sekularisme yang bermaksud memisahkan agama dari seluruh lini kehidupan termasuk politik. Politik identitas justru merupakan politik yang pancasialis, Ridho merujuk pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, kita sebagai manusia atau dalam ranah khusus merupakan masyarakat Indonesia yang wajib berketuhanan maka sudah sepatutnya mereka yang berketuhanan tidak melepaskan aturan Tuhan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga turut menyampaikan bahwa berkampanye di masjid bukan suatu masalah besar karena saat pemilihan khalifah dalam agama Islam juga dilaksanakan di masjid. Dapat disimpulkan bahwa politik identitas yang diangkat oleh Partai Ummat pada dasarnya menegaskan bahwa integrasi akan hal-hal dalam kehidupan termasuk agama tidak dapat dipisahkan dalam lingkup politik (Dirgantara & Rastika, 2023).

Langkah Partai Ummat memutuskan menggunakan secara terang-terangan politik identitas tergolong menjadi keputusan yang sangat berani dan menantang. Dikatakan keputusan berani dan menantang karena adanya stigma negatif politik identitas yang hadir ditengah-tengah masyarakat dan para politisi. Bahkan dapat dikatakan partai-partai yang berlatar belakang identitas agama tidak cukup berani untuk gamblang mengatakan bahwa partainya menggunakan politik identitas agama mengingat sentimen negatif yang akan timbul

dan tentunya merugikan partainya di pemilu mendatang. Langkah yang diambil oleh Partai Ummat membuat mencuatnya berbagai kerisuhan politik menjelang pemilu 2024, tak ayal pernyataan kontroversial mengenai politik identitas tersebut menjadi perdebatan hangat di pemilu tahun 2024.

Partai Ummat mengusung visi "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur," yang berarti negeri yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pengampun. Visi ini menunjukkan komitmen Partai Ummat terhadap politik berbasis Islam, yang tercermin dalam ideologi politik identitas mereka yang menonjolkan identitas agama Islam. Partai ini bahkan tidak merasa keberatan untuk berkampanye di masjid, serta menggunakan contoh pemilihan Khulafaurrasyidin di masjid setelah masa Rasulullah sebagai referensi. Pernyataan Ridho Rahmadi menegaskan bahwa ideologi Islam adalah dasar dari gerakan Partai Ummat (Gitiyarko, 2023).

Amien Rais, yang sebelumnya dikenal sebagai pendiri PAN dengan ideologi nasionalisme, mendirikan Partai Ummat setelah menghadapi konflik internal. Langkah ini diambil untuk menantang partai lamanya dan meraih dukungan dari pemilih Islam. Perdebatan antara PAN dan Partai Ummat berkisar pada politik identitas, dengan Partai Ummat secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai partai politik identitas. Hal ini sejalan dengan strategi Amien Rais yang ingin memanfaatkan politik identitas Islam sebagai fondasi gerakan dan ideologinya. Amien Rais percaya bahwa melalui strategi ini, dengan mengandalkan populisme dan retorika agama, dia dapat menciptakan pemisahan politik yang signifikan dalam masyarakat (Hamdanny & Mukhtar, 2021: 199).

Strategi Partai Ummat dalam menggunakan politik identitas tampaknya merupakan bagian dari rencana mereka untuk menarik dukungan masyarakat, khususnya umat Muslim, baik secara individu maupun melalui kelompok-kelompok Muslim menjelang pemilu 2024. Meskipun pernyataan Partai Ummat diperkirakan dapat menarik dukungan dari umat Muslim, masih banyak kritik yang menyoroti politik identitas mereka, mengingat bahwa konsep ini seringkali mendapat tanggapan negatif. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa ada sebagian masyarakat yang mendukung, karena politik identitas tidak selalu memiliki konotasi buruk dalam perkembangannya.

Penggunaan ideologi *mainstream* seperti politik identitas tentu menuai beragam komentar dari kalangan masyarakat awam maupun elit politik mulai dari reaksi pro politik identitas dan kontra. Mereka yang pro politik identitas seperti Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik mengatakan bahwa politik identitas yang digaungkan oleh Partai Ummat bukanlah sebuah *statement* yang menimbulkan permasalahan karena menurutnya berkampanye politik di masjid atau tempat ibadah bukanlah tindakan yang keliru, tindakan tersebut justru mengarahkan umat Islam agar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjadi bagian dari politik inspiratif. Sebaliknya, jika mereka yang bersangkutan tidak bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI, maka politik identitas bukanlah alternatif yang tepat untuk dipilih (Maulana, 2023).

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dengan beragam konflik dalam pemilihannya pada 2017 lalu juga berkaitan dengan ihwal politik identitas. Anies berpendapat bahwa menurutnya politik identitas tidak dapat dihindari mengingat manusia pasti memiliki identitasnya masing-masing. Contoh sederhananya dapat terlihat ketika calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, tentunya mereka tidak dapat dipisahkan dari identitas gender. Begitupula dengan konflik di Pilkada 2017 antara dirinya dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan membawa identitas agama, menurutnya karena dua calon memiliki identitas agama yang berbeda maka identitas yang tersorot masyarakat adalah agama. Hal tersebut akan terus terjadi berulang kali apabila calonnya memiliki identitas yang berbeda. Anies juga menyinggung soal kinerja bagus yang ia hasilkan sehingga membuktikan bahwa politik identitas yang ia lakukan tidak berpengaruh dengan kinerja yang ia hasilkan (Tenola, 2023).

Penggunaan politik identitas juga menciptakan kubu kontra dalam masyarakat pada umumnya dan para elit politik pada khususnya. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan keputusan kontranya dengan mengatakan bahwa Partai Ummat dalam kaitannya dengan pernyataan beraninya bahwa mereka adalah partai politik identitas adalah wujud dari pemahaman mereka yang dangkal atas aspek-aspek fundamental pembentukan bangsa Indonesia. Menurutny, partai politik seharusnya memahami sejarah bagaimana Indonesia merdeka dan memahami secara benar makna dari ideologi Pancasila. Terlebih, isu politik identitas telah lama merebak di tengah-tengah masyarakat dalam Pilkada 2017 lalu dan terulang kembali di Pilpres 2019. Sehingga menurut Hasto, politik identitas yang dinyatakan oleh Partai Ummat tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia mengingat kesan yang ditimbulkan lebih kepada konotasi negatif (Mantalean & Santosa, 2023).

Pendapat kontra juga datang dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihak bawaslu akan memberikan teguran keras kepada partai yang menggunakan politik identitas. Rahmat Bagja akan bertindak memberi teguran terlebih dahulu tetapi tidak dijelaskan bagaimana langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Ia berpendapat bahwa dengan menggunakan politik identitas di Indonesia yang masyarakatnya notabene bersifat majemuk akan berujung pada saling meniadakan identitas agama satu sama lain. Menurutny politik dan agama memiliki ruangnya masing-masing, sikap bijaksana dan mengedepankan toleransi sangat penting dalam ruang terbuka. Bagja menambahkan bahwa Indonesia dibangun atas lima agama yang diakui oleh negara. Oleh karenanya, dengan adanya politik identitas agama seolah meniadakan salah satu agama atau mengunggulkan salah satu agama. Bagja juga memberikan teguran mengenai statement Partai Ummat bahwa tempat ibadah boleh dijadikan sarana kampanye (Detikcom, 2023).

Partai politik jika dilihat dari sudut pandang perundang-undangan tercantum dalam pasal 9 ayat 1-3 UUD Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang intinya dijelaskan aturan bahwasannya asas dan ciri partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika diperhatikan dirasa politik identitas tidak melanggar salah satu dari ketentuan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 karena pengertian dari politik identitas itu sendiri yang merupakan suatu pergerakan dengan mengedepankan identitas baik identitas etnis, agama, suku, dan lain sebagainya. Partai Persatuan Pembangunan yang jelas berasaskan Islam dan bahkan memakai Ka'bah sebagai lambang partainya tersebut terang mengedepankan

adanya identitas agama Islam didalamnya. Dalam UUD juga disebutkan bahwa partai politik boleh mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan cita-cita partai tanpa melanggar Pancasila dan UUD 1945 (Mannan, 2021: 29).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berbicara politik identitas lebih ke arah kontra, BPIP berpendapat bahwa politik identitas menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah karena perbedaan kelompok identitas. Untuk mengatasinya, BPIP selaku Badan yang mengawasi jalannya ideologi Pancasila di Indonesia berpendapat bahwa Indonesia dapat meredam derasnya arus politik identitas di Indonesia dengan memangku Pancasila sebagai dasar negara yang merangkul seluruh perbedaan dengan menepis isu-isu ras, suku, dan keagamaan yang memicu konflik berpolitik di Indonesia. BPIP secara lugas menyatakan bahwa politik identitas bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yakni “Persatuan Indonesia.” Persatuan Indonesia yakni dalam kaitannya dengan politik identitas adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (Pusdatin, 2021).

Pendapat pro dan kontra yang disampaikan oleh berbagai pihak kemudian membuka kembali pertanyaan mengenai apa sebenarnya fungsi dari partai politik itu sendiri sebagai salah satu pihak yang ikut andil besar dalam kontestasi pemilu?. Menanggapi pertanyaan mendasar diatas, sebenarnya negara telah mengatur fungsi partai politik yakni dalam UU Parpol yang menyatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas dan sebagai wadah integrasi sebagaimana partai umat dengan tujuannya sebagai suatu sarana pendidikan dalam bidang politik dengan upaya membangun etika dan budaya berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tujuan semacam itu kemudian warga negara memberikan legitimasi formal untuk membangun paradigma baru untuk menegaskan salah satu embrio dari politik identitas yakni populisme politik berdasar sentimen keislaman (Budiardjo, 2008: 17).

Berdasarkan fungsi dari partai politik termasuk Partai Ummat dapat ditarik konklusi bahwa dalam kaitannya dengan politik identitas, seharusnya partai politik dapat menjadi sebuah wadah integrasi dan sarana pendidikan bagi masyarakat luas untuk menegaskan praktik politik identitas dalam pemilu 2024 karena narasi politik identitas yang mengarah pada konotasi negatif. Tetapi disisi lain, narasi politik identitas yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya keliru jika yang dikedepankan oleh Partai Ummat pada khususnya adalah terkait Partai yang menjunjung tinggi moral keislaman bukan sebagai alat untuk memecah belah umat beragama demi memenangkan pemilu (Yehezkiel and Takalamingan, 2023: 261).

Partai politik pada akhirnya dapat mereduksi dan merepresentasikan kembali fenomena politik identitas dengan mengoptimalkan pendidikan politik kepada masyarakat yang pada ranah ini didasarkan pada haluan ideologi. Partai yang kemudian berideologi nasionalis dapat menciptakan sistem pendidikan politik berpegang pada republikanisme dan untuk partai yang berideologi Islam berlandaskan pada pendidikan politik berbasis moderasi beragama. Kedua doktrin tersebut merupakan sarana doktrin populisme Pancasila sebagai dikotomi politik identitas menjembatani dan menyatukan berbagai pandangan dalam kerangka Pancasila, agar bisa mengatasi dan meredam politik berbasis agama yang mungkin memecah belah masyarakat (Yehezkiel and Takalamingan, 2023: 262).

4. KESIMPULAN

Polemik mengenai politik identitas selalu menjadi tema menarik dalam kancah perpolitikan. Politik identitas diartikan sebagai gerakan politik yang berdasarkan identitas etnis, suku, ras, dan agama. Oleh karenanya, politik identitas dianggap menimbulkan dampak cukup serius karena dalam praktiknya mereka yang menggunakan politik identitas cenderung menguntungkan salah satu pihak yang beridentitas sama. Partai Ummat justru mengusung penggunaan politik identitas secara terang-terangan, hal ini dirasa wajar karena visi dan misi dari Partai Ummat serta ideologinya lebih mengarah pada golongan agama tertentu yakni agama Islam, terlebih Partai Ummat menarget ceruk pemilih islam dalam Pemilu. Tetapi, di lain sisi berkenaan dengan politik identitas, mereka yang kontra juga berpendapat bahwa politik identitas seakan memanfaatkan agama dalam kontestasi politik. Hingga saat ini, berkenaan dengan politik identitas biasanya mengarah pada konotasi negatif dan tentu berpengaruh dengan ceruk pemilih di Pemilu 2024. Artinya, *respect* masyarakat pada Partai Ummat justru menurun, buntut dari pernyataan kontroversial berkenaan dengan politik identitas tersebut.

Pernyataan kontroversial oleh Ridho Rahmadi selaku Ketua DPP Partai Ummat memancing beragam komentar dari masyarakat dan elit politik. Mereka yang pro dengan politik identitas yang dinyatakan Partai Ummat seperti Anies Baswedan mengungkapkan bahwa setiap individu pastilah memiliki identitasnya masing-masing, sehingga politik dan identitas tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa konflik besar akan muncul sebagai bentuk respon dari politik identitas tersebut, seperti komentar dari Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat lima agama, dengan adanya politik identitas seolah meniadakan agama lain. Pro dan kontra dari politik identitas dapat diambil sikap tengah dengan menggunakan fungsi dari partai politik itu sendiri. Partai politik berhaluan Islami seperti Partai Ummat dalam menerapkan fungsi sarana pendidikan dan wadah integrasi yang berfokus pada moderasi beragama sehingga meminimalkan kemungkinan konflik yang timbul.

Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana moderasi beragama dapat diimplementasikan oleh partai politik dalam konteks pemilu mendatang. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meredakan ketegangan sosial akibat politik identitas, serta bagaimana partai-partai tersebut dapat membangun citra positif di mata masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai inklusif. Selain itu, analisis terhadap persepsi masyarakat mengenai moderasi beragama juga perlu dilakukan untuk memahami harapan dan kekhawatiran mereka terkait dengan penggunaan politik identitas dalam arena politik saat ini. Serta, penelitian jangka panjang untuk menganalisis dampak berkelanjutan politik identitas terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Iskandar, Andrew Ridow Johanis M, Mansyur, Rita Fitriani, Nur Ida, & Putra Hendra S. Sitompul. (2023). *Dasar Metode Penelitian* (A. Iskandar (ed.); 1st ed.). Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia .
- Argenti, G. (n.d.). *Partai Baru Antara Gelora, Ummat, Dan Masyumi (Reborn)*.
- Astuti, D., Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu di Indonesia. *Sibatik Journal, Jurnal Ilmu Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2, 1769–1778. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Detikcom, T. (2023). *Partai Ummat “Kami Politik Identitas” Bikin Bawaslu Beri Protes Keras*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6579919/partai-ummat-kami-politik-identitas-bikin-bawaslu-beri-protas-keras>
- Dirgantara, A., & Rastika, I. (2023). *Ketum Partai Ummat Nilai Ada Anggapan yang Salah soal Politik Identitas*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/13232641/ketum-partai-ummat-nilai-ada-anggapan-yang-salah-soal-politik-identitas>
- Fadhlan, A. N., & Azizah, N. (2023). Politik Identitas di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies-Sandi di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017 Sampai 2022). *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i2.316>
- Febriansyah, B. A., Manando, I., & Kusuma, A. W. (2024). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 46–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>
- Harahap, F. R. (2014). Politik identitas berbasis agama. *Prosiding Sosiologi Konflik Dan Politik Identitas*. Yogyakarta.
- Kunawi, K. (2012). Titik Temu Agama-agama dalam Analisis Interpretatif. *Religió Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2). <https://jurnalufuf.uinsa.ac.id/index.php/religio/article/view/340>
- Luxiana, K. M. (2023). *Partai Ummat: Kami Adalah Politik Identitas!* DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6566940/partai-ummat-kami-adalah-politik-identitas>
- Maghfira Faraidiany, Novita Sari, & Siti hardiyanti. (2022). Polemik Politik Identitas Di Indonesia. *Journal of Political Sphere*, 3(2), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jps.v3i2.30496>

- Mannan, H. (2021). *Analisis UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH]. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18930/1/Husnul Mannan, 160105070, FSH, HTN, 085362455648.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18930/1/Husnul%20Mannan_160105070_FSH_HTN_085362455648.pdf)
- Mantalean, V., & Santosa, B. (2023). *PDI-P: Partai Ummat Tak Paham Pembentukan Bangsa karena Usung Politik Identitas*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/19/18435381/pdi-p-partai-ummat-tak-paham-pembentukan-bangsa-karena-usung-politik>
- Maulana, I. (2023). *Partai Ummat Kampanyekan Politik Identitas, Mahfud MD Bilang Begini*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/1031915/12/partai-ummat-kampanyekan-politik-identitas-mahfud-md-bilang-begini-1677286978>
- Muhammad Hima El Muntaha, & Tian Adhia Nugraha. (2024). Dinamika Gerakan Perlawanan dan Populisme Politik: Analisis Kasus Amien Rais dalam Mendirikan Partai Ummat. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 5(2), 71–80. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i2.20298>
- Nasruddin, J. (2018). Politik Identitas Dan Representasi Politik. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1, 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/>
- Prof. Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (P. Lubis (ed.); 1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama .
- Pusdatin. (2021). *Pancasila sebagai Lokomotif Meredam Politik Identitas*. Bpip.Go.Id. <https://bpip.go.id/berita/pancasila-sebagai-lokomotif-meredam-politik-identitas?page=1>
- Ramadhan, A. (2023). *Strategi Politik Partai Ummat Menuju Pemilihan Umum 2024*. UIN Sumatera Utara Medan .
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (1st ed.). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Tenola, D. (2023). *Anies Baswedan Blak-blakan Politik Identitas Tak Bisa Dihindarkan*. DetikNews. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6625444/anies-baswedan-blak-blakan-politik-identitas-tak-bisa-dihindarkan>
- Wati, W. (2021). Menguatnya politik identitas di indonesia baik karena faktor agama, sosial, dan etnis. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 66–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>
- Widayanti, T. (2009). *Politik subaltern: pergulatan identitas waria*. Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. <https://books.google.co.id/books?id=WprfSAAACAAJ>
- Wiji Utomo, W. (2023). Analisis Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat

“Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 26–45. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5617>

Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>

Yehezkiel, P. W., & Takalaminingan, M. (2023). Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 251–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.736>